

mengadakan kunjungan diplomatik ke berbagai negara. Paus Yohanes Paulus II juga tidak jarang melakukan kunjungan ke negara-negara yang sedang dilanda konflik. Bahkan dia sempat mengalami percobaan pembunuhan saat melakukan konvoi pemberkatan¹. Hal ini tidak lain ditujukan untuk mewujudkan sebuah kondisi hubungan internasional yang tertib, selaras, serasi dan seimbang tanpa adanya penggunaan kekerasan². Sehingga tidak mengherankan apabila lebih dari dua ratus pemimpin dan utusan dari berbagai negara datang menghadiri pemakamannya³.

Berbagai sikap politik dan keagamaan yang dikeluarkan Paus Sejak kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II, banyak langkah-langkah yang ditempuh Vatikan untuk menghindarkan dunia dari kekacauan, terutama terhadap masalah konflik antar bangsa dan dialog antar umat beragama. Salah satu upaya yang dilakukannya yakni mengusahakan terciptanya perdamaian antar umat beragama yang semasa kepemimpinannya sangatlah rawan untuk timbulnya konflik. Paus Yohanes Paulus II juga merupakan aktor penting dalam upaya mewujudkan stabilitas internasional. Salah satu perjuangannya adalah memfokuskan terhadap upaya penghentian perang dingin yang menurutnya hanya akan menimbulkan banyak korban dan kehancuran. Inilah salah satu isi dari surat wasiatnya sebelum akhirnya meninggal⁴.

Tidak sedikit permasalahan yang akan dihadapi dalam menyongsong masa

..... penelitian kelengkapan di Gereja Vatikan. Disamping menghadapi

permasalahan internal Vatikan sendiri, masalah lainnya juga termasuk posisi Vatikan dalam kancah hubungan internasional pasca kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II. Permasalahan lain yang juga akan dihadapi adalah timbulnya perbedaan pandangan terhadap masa depan Vatikan antara Paus Yohanes Paulus II dimasa kepemimpinannya dengan pemimpin baru yang akan menggantikannya.

Pergantian kepemimpinan gereja Vatikan dari Paus Yohanes Paulus II ke Paus Benediktus XVI sedikit banyak juga telah merubah kebijakan dalam tubuh Vatikan itu sendiri. Sikap politik keagamaan gereja suci Vatikan pada masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II dan kepemimpinan Vatikan sekarang oleh Paus Benediktus XVI, menarik penulis untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan penulis. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan politik keagamaan yang dikeluarkan oleh Vatikan pada masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus XVI
2. Sebagai manifestasi dari pengaplikasian teori-teori yang penulis

C. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tahta suci Vatikan sama halnya negara-negara lain didunia sangat berpengaruh dalam hubungan internasional. Vatikan merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional dan bahkan dapat dikatakan sebagai aktor yang unik. Ini dapat dilihat dari kondisi Vatikan itu sendiri, sebuah negara transnasional sebuah negara dalam negara.

Negara Kota Vatikan dibentuk melalui traktat Lateran yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1929 antara wakil Perdana Menteri Vatikan Kardinal Pietro Gaspari dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Beneto Mussolini.

Isi traktat Lateran tersebut mengakui kedaulatan Negara Kota Vatikan sebagai badan yuridis dan politis dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah yang dikelilingi tembok Vatikan dan juga mengatur hak milik Vatikan yang lain yang disebut sebagai "ekstrateritorial".⁵

Pada saat penandatanganan Traktat Lateran, di tandatangani pula sebuah konkordat sebagai protokol yang menjamin Sri Paus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik memimpin umat Katolik baik di Roma dan maupun diseluruh dunia.

Kedudukan Vatikan sebagai sebuah negara yang sah bahkan lebih istimewa dalam struktur politik global karena pengaruhnya yang sangat besar bagi lebih dari 1 milyar lebih penduduk dunia. Setiap sikap dan kebijakan baik sosial, politik dan keagamaan yang dikeluarkan oleh Vatikan dalam hal ini dikeluarkan oleh pemimpin Vatikan yaitu Sri Paus, akan sangat berpengaruh bagi berbagai

pengikutnya diseluruh dunia. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi kestabilan politik dan keamanan internasional, mengingat penduduk Vatikan tersebar di semua negara di dunia.

Setiap sepak terjang pemimpin Vatikan selalu menjadi perhatian dunia, mengingat betapa pentingnya figur seorang Paus dalam memimpin Vatikan maka tidaklah mengherankan jika pergantian Paus menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh semua pengamat dan jutaan pengikutnya di seluruh dunia. Ini sangat beralasan jika perhatian yang besar sebagian pengamat dan umat Katolik diseluruh dunia tertuju pada pergantian Paus karena melihat figur Paus itu sendiri yang sangat besar bagi umat katolik. Pergantian Paus juga bisa jadi akan merubah kebijakan-kebijakan politik dan keagamaan dalam Vatikan yang mungkin berbeda dari Paus sebelumnya.

Negara Kota Vatikan merupakan sebuah lembaga Negara yang sebenarnya sama seperti Negara lain yang ada didunia. Keistimewaan yang dimiliki oleh Vatikan salah satunya adalah Paus sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan tertinggi di Vatikan yang bersifat monarki yang dipilih, tetapi secara absolut, teokratis dan patrimonial, serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislative, eksekutif dan juga yudikatif.⁶

Sebagai seorang pemimpin lebih dari 1 milyar umat katolik diseluruh dunia, Paus yang merupakan wakil Kristus didunia penggembala umatnya, memiliki peran yang sentral bagi kehidupan umatnya. Pencitraan seorang paus sebagai kepala yang oleh umat katolik dan daltrin *Docton Aeternus* sebagai

sosok luput dari kesalahan (infallibilitas paus).⁷ Setiap detik gerak, tindakan dan ucapannya merupakan panutan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan umat Katolik diseluruh dunia dan juga berpengaruh signifikan bagi konstelasi perpolitikan dunia.

Dalam setiap pengambilan kebijakannya Sri Paus berpegang pada konsili yang diadakan oleh Vatikan. Konsili merupakan bentuk interpretasi ajaran injil. Seperti halnya Paus-Paus lainnya, baik Paus Yohanes Paulus II maupun Paus Benediktus XVI memiliki peran besar dalam setiap kebijakan di Vatikan. Setiap kebijakan mereka juga berpegang teguh pada Bible yang termanifestasikan dalam Konsili Vatikan.

Sinode (juga dikenal sebagai konsili) adalah sebuah dewan Gereja Kristen, yang dibentuk untuk mengambil keputusan dan kebijakan tentang doktrin, administrasi atau aplikasi.

Hasil konsili yang diadakan di Vatikan merupakan pedoman bagi Paus dalam menentukan kebijakannya. Hingga saat ini Vatikan telah mengadakan dua kali Konsili, yaitu Konsili Vatikan Pertama dihimpunkan oleh Paus Pius IX melalui kepausan *Aeterni Patris* pada 29 Juni 1868. Konsili ini merupakan konsili ekumenis kedua puluh bagi Gereja Katolik Roma, yang dihadiri hampir 800 pimpinan gereja. Tujuan utama Paus menghimpunkan Konsili ini adalah untuk memperoleh konfirmasi akan sikap yang telah ditetapkannya dalam *Syllabus Errorum* (1864), yang mengutuk serangkaian aliran rasionalisme, liberalisme, dan materialisme. Konsili Ekumenis Vatikan Kedua diadakan pada tahun 1962-1965.

Konsili Vatikan II adalah sebuah Konsili Ekumene ke-21 dari Gereja Katolik Roma yang dibuka oleh Paus Yohanes XXIII pada 11 Oktober 1962 dan ditutup oleh Paus Paulus VI pada 8 Desember 1965. Pembukaan Konsili ini dihadiri oleh hingga 2540 orang uskup Gereja Katolik Roma sedunia (atau juga disebut para Bapa Konsili), 29 pengamat dari 17 Gereja lain, dan para undangan yang bukan Katolik.

Hasil-hasil yang ada dalam Konsili Vatikan II inilah yang menjadi dasar kebijakan bagi Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus XVI. Dalam mengambil kebijakan dan bersikap terhadap segala realita yang terjadi di dunia.

Adalah Paus Yohanes Paulus II, Paus terlama ketiga yang memimpin Vatikan selama sekitar 26 tahun, oktober 1978 – April 2005. Paus Yohanes Paulus II memimpin Gereja dengan kharisma yang besar. Pengaruhnya tidak hanya dikalangan internal gereja katolik tetapi sosoknya, gagasan dan pemikirannya menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas lain diluar gereja.

Paus Yohanes Paulus II adalah seorang anak Polandia bernama Karol Jozef Wojtyla. Lahir pada 18 Mei 1920 di Wadowice, sebuah kota dengan 8.000 umat Katolik dan 2.000 orang Yahudi, 56 kilometer di barat daya Krakow. Pada saat kecil, dia dipanggil teman-temannya dan orang tuanya dengan nama "Lolek".⁸

Selama kepemimpinannya banyak kebijakan politik keagamaan Vatikan telah dikeluarkan, sebagai manifestasi dari hasil Konsili Vatikan II dan penterjemah sekaligus wakil kristus didunia. Berbagai isu kontemporer dunia, mulai *high politic*, *low politic* hingga urusan kepribadian manusia dalam hal ini

⁸ <http://www.kompas.com>, 11 Desember 2005, hal.20

umat Katolik tak pernah lepas dari perhatiannya. Geliat perang dingin yang memuncak pada masa kepemimpinannya menghadirkan sosok Paus Yohanes Paulus II sebagai figur penting dalam pertarungan itu. Hingga isu terakhir pada akhir masa jabatannya menyangkut perang Iraq dan Afganistan, serta isu terorisme dunia. Degradasi moral yang Sri Paus anggap telah menggrogoti setiap detik kehidupan manusia menyangkut isu tentang perkawinan sejenis, aborsi dan isu lain juga menjadi perhatian serius Sri Paus hingga akhir hayatnya.

Dan kini pekerjaan rumah yang sama dan bahkan lebih berat juga akan dihadapi oleh penerusnya, yaitu Paus Benediktus XVI. Kardinal Jerman, Joseph Ratzinger terpilih sebagai Paus baru menggantikan Paus Yohanes Paulus II. Joseph Ratzinger bergelar Paus Benediktus XVI, merupakan pemimpin Gereja Vatikan kedua setelah Paus Paulus II yang berasal dari luar Italia. Hal ini mengindikasikan bahwa saat ini pemimpin Vatikan tidak harus berasal dari Italia.

Perbedaan pandangan antara Paus Paulus II dengan Paus Benediktus XVI bukan tidak mungkin akan membawa perubahan mendasar terutama dalam lingkungan internal Vatikan dan juga berdampak terhadap ummat Katholik seluruh dunia. Kalaupun visi dan misi serta program yang dijalankan Paus Paulus II kemudian dilanjutkan oleh Paus Benediktus XVI, itu tidak berarti tidak akan mengubah program yang diemban oleh Paus Paulus II. Mengingat usia Ratzinger (Paus Benediktus XVI) yang sudah mencapai usia 78 tahun, maka kemungkinan ia dipilih hanya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan semasa Paus Paulus II.

Paus Paulus II⁹. Tetapi terjadinya pergeseran kebijakan dalam tubuh Vatikan dapat dan mungkin terjadi. Sebesar apapun pergeseran kebijakan dan sikap politik keagamaan Vatikan yang diemban oleh Paus Benediktus XVI akan tetap berpedoman pada konstitusi Vatikan yang ada pada hasil Konsili II Vatikan.

D. Pokok Permasalahan

Bagaimana pergeseran kebijakan politik keagamaan dalam Gereja Katolik Vatikan dari Paus Yohanes Paulus II ke Paus Benediktus XVI?

E. Kerangka Dasar Teoritik

Teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Dari pengertian tersebut, maka bisa dikatakan secara gampang bahwa teori adalah “suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi”. Jadi, berteori adalah “pekerjaan menonton”, yakni pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian tersebut dimasa mendatang¹⁰.

Untuk menjelaskan dan menganalisa kebijakan politik dan keagamaan yang ada dalam tubuh Vatikan, maka penulis menggunakan teori :

⁹ *Radio Nederland, 20 April 2005*

Analisa Sistem Politik (David Easton)¹¹

Studi politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Kita dapat berusaha memahami kehidupan politik dengan melihat segi-seginya satu persatu. Kita dapat menyelidiki berfungsinya lembaga-lembaga politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah dan voting. Lebih jauh kita bisa mempelajari sifat-sifat dan akibat-akibat dari praktek-praktek politik seperti manipulasi, propaganda dan kekerasan. Kita juga dapat meneliti struktur tempat terjadinya praktek-praktek ini. Dan dengan menggabungkan hasil-hasil penyelidikan itu kita dapat memperoleh suatu gambaran kasar tentang apa yang terjadi dalam setiap unit politik.

Dengan berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus berkerjanya sistem politik tersebut adalah dengan adanya berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem tersebut berada. Rumusan tersebut sangatlah sederhana namun cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

a. Input

Terdapat dua jenis pokok-pokok input dalam suatu sistem politik yaitu berupa tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi-informasi yang harus diproses oleh sistem tersebut dan juga sekaligus sebagai energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem tersebut.

Tuntutan mempengaruhi perilaku suatu sistem dalam berbagai acara. Tuntutan itu merupakan suatu bagian penting dari bahan dasar yang diperlukan untuk bekerjanya suatu sistem. Tuntutan-tuntutan itu timbul dari dua bidang pengalaman. Mereka adalah tuntutan yang datang dari lingkungan disekitar sistem tersebut dan tuntutan yang justru berasal dari sistem itu sendiri. Berdasarkan asal dari timbulnya tuntutan-tuntutan tersebut maka selanjutnya dapat disebut sebagai tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Sangat perlu bagi kita untuk membedakan tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Karena ia bukanlah input yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut tetapi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam sistem itu sendiri (withinput) dan karena konsekuensi-konsekuensi yang ia timbulkan terhadap ciri suatu sistem politik lebih langsung dari pada yang ditimbulkan oleh tuntutan eksternal.

Tuntutan sebagai bahan dasar bekerjanya suatu sistem politik, memiliki mekanisme tersendiri agar bisa diubah menjadi sebuah isu politik. Dalam hal ini isu adalah suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-saluran yang

11 | Page | *Tuntutan sebagai bahan dasar bekerjanya suatu sistem politik*

maupun eksternal tidak akan begitu saja dapat menjadi sebuah isu politik. Banyak tuntutan yang mati begitu diajukan atau pengajuannya yang tidak lancar karena hanya didukung oleh golongan masyarakat yang kurang berpengaruh dan tidak pernah bisa masuk kedalam tingkat pembuat keputusan.

Input-input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangikan suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul didalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Input semacam ini disebut sebagai dukungan.

Tanpa dukungan, tuntutan tidak bisa dipenuhi. Bila tuntutan ingin ditanggapi, anggota-anggota sistem yang memperjuangkan menjadi keputusan yang mengikat dan mereka yang ingin mempengaruhi menjadi proses-proses yang relevan harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dalam sistem tersebut.

Dukungan sebagai energi pendorong bekerjanya sebuah sistem politik yang mendorong input tuntutan agar dapat masuk dalam tingkat pembuat keputusan dapat berupa tingkah laku yang dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan. Tingkah laku mendukung ada dua macam. Tingkah laku itu mungkin berwujud tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan

pencalonan pemimpin dalam pemilihan umum atau membela atau mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Namun tingkah laku mendukung tersebut ada kalanya tidak selalu berwujud sebagai tindakan terbuka (over actions) yang tampak dari luar, namun juga dapat berupa tingkah laku bathiniah yang kita sebut pandangan atau suasana pemikiran.

b. Output

Telah dijelaskan didepan tadi bahwa dasar yang diperlukan bagi sebuah sistem politik bekerja, menghasilkan keputusan-keputusan otoritatif yang berdampak langsung pada masyarakat adalah karena adanya input-input berupa tuntutan dan dukungan. Kedua macam input tersebut yang kemudian dapat masuk kedalam tingkat pembuatan keputusan dalam sistem politik, dan melalui mekanisme khusus yang berlaku dalam sistem politik tersebut maka lahirlah apa yang disebut sebagai output atau yang disebut konsekuensi-konsekuensi timbulnya keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif.

Output dari suatu sistem politik adalah berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Sebagai sebuah hasil kerja sistem politik, maka sebuah output tetaplah memiliki kaitan dengan input yang berupa dukungan dan tuntutan yang telah berperan penting sebagai bahan dasar terbentuknya output berupa keputusan atau kebijaksanaan politik.

Output dapat dipahami sebagai konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari bekerjanya sebuah sistem politik yang menghasilkan keputusan dan

.....

timbul dari masyarakat. Sebuah kebijaksanaan politik timbul dari adanya suasana yang mungkin mendukung atau bahkan menolak lahirnya kebijaksanaan politik yang dihasilkan sistem politik tersebut. Hal inilah yang bisa dipahami bahwa terdapat suatu hubungan yang erat antara masyarakat sebagai salah satu sumber utama timbulnya input dengan output sebagai hasil dari pengolahan input yang memiliki konsekuensi langsung atas penerapannya didalam masyarakat.

Karena output-output khas dari suatu sistem adalah keputusan kebijaksanaan politik, maka pada pemerintah terletak tanggung jawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan. Keputusan sebagai hasil pengolahan input memiliki arti sebagai pertanggungjawaban terhadap input yang timbul dalam masyarakat. Didepan tadi telah kita bahas bahwa bentuk dan macam input, sedikit banyak akan mempengaruhi bentuk dan hasil berupa output keputusan dan kebijaksanaan politik. Sebaliknya, keputusan dan kebijaksanaan politik yang timbul haruslah sesuai dengan input yang mendasarinya. Hal inilah yang sering dianggap sebagai ukuran optimal sebuah sistem politik dalam hal pembuatan keputusan. Artinya sistem politik yang baik dikenal sebagai politik yang mampu menyusun kebijakan atau output yang selaras dengan input yang mendasarinya. Secara sederhana, apa yang menjadi tuntutan dalam masyarakat dapat dituangkan dalam kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat tadi.

Dalam sebuah sistem politik dalam hal ini sistem yang ada dalam Negara
Kata: Nilai-nilai, kerangka yang dibutuhkan oleh seorang. Dan merupakan

keputusan yang himbuan autoritatif yang dihasilkan dari konversi atas bekerjanya sistem politik tersebut.

Negara Kota Vatikan merupakan sebuah lembaga Negara yang sebenarnya sama seperti Negara lain yang ada didunia. Keistimewaan yang dimiliki oleh Vatikan salah satunya adalah Paus sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan tertinggi di Vatikan yang bersifat monarki yang dipilih, tetapi secara absolut, teokratis dan patrimonial, serta mempunyai kekuasaan penuh dalam hal legislatif, eksekutif dan juga yudikatif.¹²

Semua keputusan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan Paus adalah garis kebijakan dalam Negara Kota Vatikan itu sendiri. Melihat kekuasaan Paus yang sangat absolut dalam berbagai bidang kenegaraan dan pemerintahan yang kontras dan sangat berbeda dengan lazimnya Negara lain yang ada didunia. Inilah salah satu keunikan Negara kota vatikan dimana keabsolutan seorang Paus merupakan sebuah fenomena yang istimewa berbeda bila kita membandingkan Negara lain yang memiliki kepemimpinan absolut.

Dalam sebuah lembaga Negara vatikan, Sri Paus tidaklah bekerja sendirian. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Negara sekaligus sebagai pemimpin umat Katolik diseluruh dunia, Sri Paus dibantu oleh Komisi Kepausan Negara Kota Vatikan, yang mewakili Bapa Suci dalam menjalankan pemerintahan sipil Negara vatikan sesuai dengan mandat khusus dari Sri Paus.¹³

Sri Paus juga dibantu oleh lembaga-lembaga khusus seperti Kongresi-Kongresi yang membantu Paus merancang kebijakan dan peraturan dalam bidang

tertentu. Anggota kongresi adalah para kardinal dan uskup yang bisa berasal dari seluruh dunia.

Kebijakan dalam Vatikan merupakan output dalam sistem politik yang ada di Negara Kota Vatikan. Kebijakan itu berpedoman pada konstitusi keagamaan Vatikan yang ada dalam Konsili yang diadakan oleh Vatikan. Interpretasi dari konsili tersebut dapat dilihat dalam kebijakan Paus yang memimpin Vatikan. Konsili terakhir Vatikan diadakan tahun 1963-1965.

Sidang konsili merupakan sebuah sidang pembuatan dasar kebijakan keagamaan Vatikan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem politik berupa konversi input tuntutan dan dukungan yang nantinya menjadi kebijakan atau output terjadi di Negara Kota Vatikan sesungguhnya pada konsili tersebut. Karena hasil konsili tersebutlah yang merupakan dasar utama bagi Paus untuk menjalankan dan menetapkan kebijakannya.

Tuntutan dan dukungan yang masuk dapat diwakilkan oleh para Kardinal yang berasal dari hampir seluruh Negara di dunia. Kardinal dipilih menjadi asisten-asisten kunci dan penasihat Paus dalam berbagai urusan baik sebagai kepala Negara Vatikan maupun sebagai Kepala Gereja. Saat ini terdapat lebih kurang 115 Kardinal, mereka datang dari 52 negara di dunia.¹⁴ Dapat dikatakan mereka adalah representasi dari 1 milyar lebih umat katolik di dunia.

Paus sebagai pemegang otoritas tunggal dalam setiap pengambilan kebijakan Vatikan dalam sebuah sistem politik di Vatikan. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil dari konversi input berupa tuntutan ataupun

lebih baik terhadap tuntutan agar Vatikan lebih memepertimbangkan sisi kemanusiaan. Kardinal Carlo Maria Martini, yang pernah menjabat sebagai Uskup Milan, mengatakan pada pasangan suami-istri yang salah satunya menderita HIV/AIDS, pemakaian kondom "bukan kejahatan".

Ada tanda-tanda bahwa dokumen itu merupakan revisi besar dari kebijakan Vatikan, kata wartawan BBC Robert Pigott. Isu ini adalah salah satu yang paling kontroversial dikalangan umat Katholik, dan pihak Gereja selama ini mengemukakan keras posisi sata ini, khususnya di negara-negara Afrika yang dilanda HIV/AIDS.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar itu, Kardinal Barragan mengatakan: "Tidak lama lagi Vatikan akan mengeluarkan dokumen tentang pemakaian kondom oleh orang-orang yang sakit keras, seperti AIDS." "Paus Benediktus XVI meminta meneliti kembali soal pemakaian kondom oleh para penderita AIDS ini, dan oleh penderita penyakit menular.

Berbagai tuntutan dan dukungan terhadap isu-isu yang selalu menjadi perdebatan dalam masyarakat seperti halnya isu tentang perang, terorisme, dan juga isu kehidupan pribadi seperti perkawinan sejenis, euthanasia, aborsi dan juga dialog antar umat bergama masuk kedalam vatikan melalui saluran-saluran sistem

... dan disampaikan oleh Kardinal uskup atau

BAB I berisi tentang pendahuluan, dimana penulis menjabarkan bagaimana Vatikan dengan figur seorang Paus dalam kebijakan Vatikan. Setelah menjabarkan alasan pemilihan judul, penulis selanjutnya menjabarkan mengenai tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II penulis akan mendeskripsikan tentang sejarah negara kota Vatikan, bagaimana terbentuknya negara kota Vatikan, lembaga-lembaga negara yang ada di Vatikan. Selanjutnya juga akan dijelaskan tentang Sidang Konsili Vatikan, sejarahnya dan keputusan-keputusannya, sidang Konsili dalam sistem politik yang ada di Vatikan. Peran Kardinal pemberi input sistem politik dan peran *environment* dalam sistem politik di Vatikan. Dan juga akan dijelaskan diskursus kebijakan politik keagamaan Vatikan dalam Konsili Vatikan II.

BAB III penulis akan menjelaskan dan menjabarkan tentang kebijakan kebijakan politik keagamaan apa saja yang dikeluarkan Vatikan pada masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II

BAB IV penulis akan menjabarkan dan mengulas tentang kebijakan kebijakan politik keagamaan apa saja yang dikeluarkan Vatikan pada masa kepemimpinan dan Paus Benediktus XVI, pergeseran-pergeseran apa saja yang terjadi dan motif terjadinya.